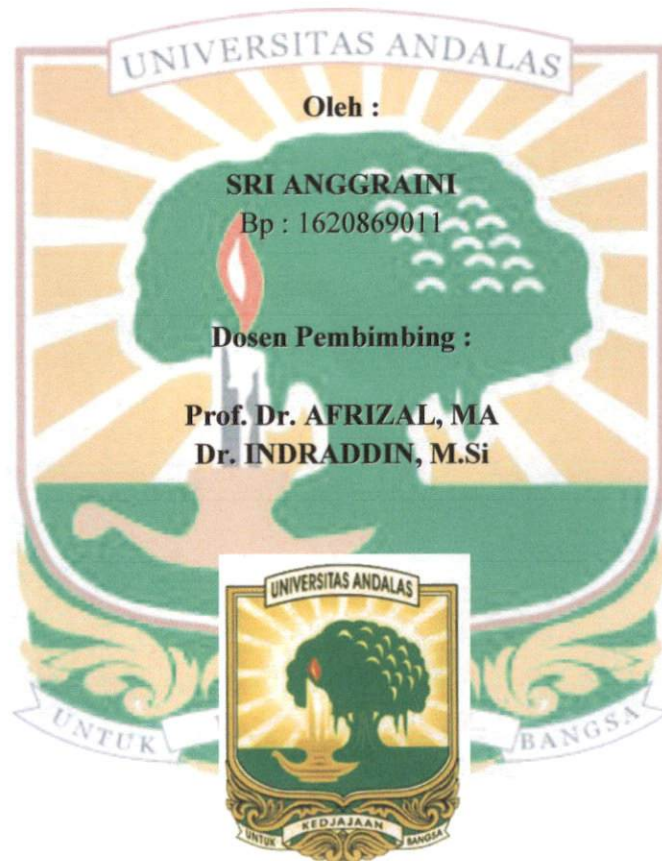


REGULASI KONFLIK PEMILU
“Studi Kasus Resolusi Konflik Pilkada 2015 dan Persiapan Pemilu
2019 di Kabupaten Sijunjung”

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas



KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018

REGULASI KONFLIK PEMILU
“Studi Kasus Resolusi Konflik Pilkada Tahun 2015 dan Persiapan
Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung”

Oleh : SRI ANGGRAINI (1620869011)
(Dibawah bimbingan : Prof. Dr. Afrizal, M.A dan Dr. Indraddin, M.Si)

ABSTRAK

Pada saat pelaksanaan Pemilu/Pilkada, tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik. Baik itu konflik antara peserta Pemilu, antara peserta dengan penyelenggara Pemilu ataupun sesama penyelenggara Pemilu. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, dimana konflik yang terjadi adalah antara KPU dengan Panwaslu dan KPU dengan PDIP. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan apabila semua pihak berperan sesuai dengan peranannya masing-masing sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi regulasi konflik Pemilu terhadap penanganan konflik Pemilu di Kabupaten Sijunjung serta untuk menganalisis respon para pihak yang berkonflik terhadap penggunaan regulasi konflik Pemilu di Kabupaten Sijunjung. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sedangkan jenis penelitian bersifat deskriptif, yang berguna untuk memberikan gambaran terperinci dari realitas penelitian yang dilakukan dengan *purposive sampling* (secara sengaja). Untuk melihat masalah ini peneliti menggunakan Teori Regulasi Konflik Ralf Dahrendorf yang menjelaskan bahwa regulasi konflik dapat mempengaruhi tinggi rendahnya eskalasi konflik yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan, dalam penyelesaian konflik yang terjadi baik itu konflik Pemilihan Kepala Daerah 2015 ataupun konflik pada saat persiapan Pemilihan Umum 2019, peneliti menemukan bahwa regulasi konflik Pemilihan Umum memiliki peranan / kontribusi didalam penyelesaian konflik, dimana konflik yang terjadi dapat dikontrol dan diselesaikan dengan baik tanpa adanya peningkatan kearah kekerasan. Hal ini dibuktikan dimana pihak yang berkonflik dapat menerima keputusan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam penyelesaiannya ditambah dengan tidak adanya aktor konflik lain yang terlibat dalam konflik tersebut.

Kata Kunci : Pemilu, konflik , resolusi dan regulasi

REGULATION OF ELECTION CONFLICT
“Case Study of 2015 Local Election Conflict Resolution and Preparation
2019 Election in Sijunjung District”

By : SRI ANGGRAINI (1620869011)
(Supervised by : Prof. Dr. Afrizal, M.A dan Dr. Indraddin, M.Si)

ABSTRACT

At the time of the election, will never be separated from the name of the conflict. Whether it is a conflict between election participants, between participants and election organizers or fellow election organizers. As happened in Sijunjung district, where the conflict is between KPU and Panwaslu and KPU with PDIP. Conflicts that occur can be resolved if all parties participate in accordance with their respective roles in accordance with existing rules or regulations.

The purpose of this research is to analyze the contribution of election conflict regulation to the handling of election conflict in Sijunjung Regency and to analyze the response of the conflicting parties to the use of election conflict regulation in Sijunjung District. The approach used in this research is qualitative with case study design. While the type of research is descriptive, which is useful to provide a detailed description of the reality of research conducted by purposive sampling (intentionally). To see this problem the researcher uses Ralf Dahrendorf's Conflict Theory of Regulation which explains that conflict regulation can affect the high and low escalation of conflicts that occur.

The results showed that in the resolution of conflicts that occurred both in the 2015 Regional Head Election conflict or the conflict during the preparation of the 2019 General Election, researchers found that the General Election conflict regulation had a role / contribution in resolving conflicts, where the conflict could be controlled and resolved properly. without an increase towards violence. This is evidenced where the conflicting parties can accept the decision given by the competent institution in its settlement plus the absence of other conflict actors involved in the conflict.

Keywords: Election, conflict, resolution and regulation